

ABSTRACT

REVIEW JURISDICTION OVER RENT LEASE AGREEMENT DEED ABOVE DONATED LAND

(Case Study Medan District Court Decision 227 / PDT.G / 2012 / PN.MDN)

By:

TIFFANI OVIANA MENDROFA

NPM: 12.840.0014

FIELD Civil Law

The lease agreement is performed on donated land by law can't be true, but in reality this is done between Amiruddin as Plaintiff, FOUNDATION THE SOUTH INDIAN MUSLIMS & Welfare COMMITTEE as Defendant I and Ir. H. Tengku Nurdin ISMA as Defendant II with the agreement of a new mosque building permanent and 6 (six) II-storey shop house door and then the problems that arises is the existence of a cancellation of the agreement by the first Defendant to the Plaintiff that resulted in Plaintiffs filed a lawsuit in State Court of Medan.

Issues that should be addressed in this thesis is how the legal consequences posed to the lease agreement on a wakaf land in Decision 227/PDT.G/2012/PN.MDN and how to resolve problems that occur in Decision 227 /PDT.G/2012/PN.MDN.

The method used in this research is normative juridical pursuant to Decision 227/ Pdt.G/2012/ PN.MDN as for the results of this research was conducted by the Agreement mentioned above is not valid because it does not meet several requirements validity of a treaty on Civil Code and under the Act endowments are not justified erect a building on donated land without approval from the endowments and if it still happens then the offending party must be willing to accept sanctions for his actions.

Keywords: Agreement, tort and leasing agreement

ABSTRAKSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP AKTA PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN DIATAS TANAH WAKAF (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan Putusan Nomor.227/PDT.G/2012/PN.MDN)

Oleh:

TIFFANI OVIANA MENDROFA
NPM : 12.840.0014
BIDANG HUKUM KEPERDATAAN

Perjanjian sewa menyewa yang dilakukan diatas tanah wakaf menurut undang-undang tidaklah dibenarkan namun dalam kenyataannya hal ini dilakukan antara AMIRUDDIN selaku Penggugat, YAYASAN THE SOUTH INDIAN MUSLIM & WELFARE COMMITTEE selaku Tergugat I dan Ir. H. TENGGU ISMA NURDIN selaku Tergugat II dengan perjanjian sebuah bangunan Mesjid baru permanent dan 6 (enam) pintu rumah toko berlantai II dan kemudian permasalahan yang muncul adalah adanya suatu pembatalan perjanjian oleh Tergugat I terhadap Penggugat yang mengakibatkan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan.

Permasalahan yang harus dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap terjadinya perjanjian sewa menyewa pada sebuah tanah wakaf pada Putusan No.227/PDT.G/2012/PN.MDN dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada Putusan No.227/PDT.G/2012/PN.MDN.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif berdasarkan Putusan No.227/Pdt.G/2012/PN.MDN adapun hasil penelitian ini adalah Perjanjian yang dilakukan oleh pihak tersebut diatas adalah tidak sah karena tidak memenuhi beberapa syarat sahnya suatu perjanjian yang pada KUHPerdara dan menurut Undang-Undang wakaf tidak dibenarkan mendirikan sebuah bangunan diatas tanah wakaf tanpa adanya ijin dari Badan wakaf dan apabila hal itu masih saja terjadi maka pihak yang melanggar harus bersedia menerima sanksi atas perbuatannya tersebut.

Kata Kunci : Perjanjian, perbuatan melawan hukum dan sewa menyewa.